

FORMAT 10
TABEL CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN (BAB 5 RENSTRA)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	PENJELASAN TERHADAP REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/9*100	12	13	14	15
1.	Penunjang	Inspektorat	Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perencanaan Perangkat Daerah	5.00	2.00	40.00				
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2.00	0.00	0.00	Dokumen RKA akan mulai di susun di Triwulan II			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.00	1.00	50.00				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.00	4.00	40.00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45.00	50.00	111.11				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.00	5.00	27.78				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.00	0.00	0.00				
						Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45.00	7.00	15.56	Menunggu persetujuan BPKP untuk mengikuti pendidikan sesuai kelender penyelenggaraan pelatihan yang dikeluarkan oleh BPKP			

			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.00	0.00	0.00				
	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.00	1.00	10.00				
Administrasi UmumPerangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	48.00	0.00	0.00	Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan alat listrik			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan peralatan kantor yang disediakan	10.00	5.00	50.00	Masih dalam proses pengadaan di ULP			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	16.00	16.00	100.00				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11000.00	1,371.00	12.46				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60.00	15.00	25.00				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	3.00	25.00				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	69.00	12.00	17.39				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300.00	289.00	22.23			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	24.00	6.00	25.00				
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12.00	3.00	25.00				

			Meningkatkan sarana da prasarana pendukung pengawasan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8.00	1.00	12.50	Pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi kendaraan			
						pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44.00	3.00	6.82				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1.00	1.00	100.00				
			Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan asset daerah dan desa serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan gan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	212.00	0.00	0.00	Pelaksanaan dilakukan pada TW II Sesuai jadwal PKPT			
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	441.00	104.00	23.58				
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu kinerja	3.00	1.00	33.33				
						Reviu Laporan Keuangan	JumlahLaporan Hasil reviu keuangan	7.00	1.00	14.29				
						Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil pengawasan desa	125.00	0.00	0.00	Desa belum tertib dalam penginputan pada aplikasi siskeudes			mendahulukan pemeriksaan pada desa yang belum diperiksa pada tahun 2022
						Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4.00	2.00	50.00				
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12.00	3.00	25.00				
					Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	12.00	0.00	0.00				
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	27.00	12.00	44.44				

				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	102.00	15.00	14.71				
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41.00	5.00	12.20				
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4.00	0.00	0.00	Masih menunggu Juknis dari KPK			

